



Analisis Perbandingan Pelayanan Pendidikan Dasar di Malaysia dan Indonesia

Hilyah Octavia Ramadhany¹, Putri Dian Mulyani², Rismaya Kurnia Savitri³, Resdyandi S Dinata⁴, Mawar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : hilyahoctavia.hor@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 10, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 27, 2025

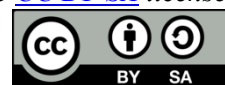
Keywords:

Education Administration,
Basic Education, Indonesia-
Malaysia Comparison,
Merdeka Belajar, Education
Policy.

ABSTRACT

This study compares the administration of primary education in Indonesia and Malaysia in the context of policy, curriculum, evaluation, use of technology, and principal leadership. Through a qualitative descriptive approach with a literature study method, it was found that the two countries have different approaches in organizing primary education, although they have the same goal of creating a quality generation. Indonesia implements a decentralized independent learning policy, providing space for curriculum innovation at the local level. In contrast, Malaysia implements a more centralized system with an emphasis on moral values through specific subjects. Evaluation of education in Indonesia still emphasizes the national exam, while Malaysia uses a holistic approach. Both face similar challenges in technology integration and gaps in educational infrastructure. The role of principals in the two countries also shows different strategies in improving the quality of education. The results of this study emphasize the importance of adapting policies to local contexts and the need for cross-country collaboration to create an inclusive, innovative, and responsive primary education system to global challenges.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 10, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 27, 2025

Kata Kunci :

Administrasi Pendidikan,
Pendidikan Dasar,
Perbandingan Indonesia-
Malaysia, Merdeka Belajar,
Kebijakan Pendidikan.

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia dalam konteks kebijakan, kurikulum, evaluasi, pemanfaatan teknologi, dan kepemimpinan kepala sekolah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, ditemukan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Indonesia menerapkan kebijakan merdeka belajar yang bersifat desentralistik, memberi ruang bagi inovasi kurikulum di tingkat lokal. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem yang lebih terpusat dengan penekanan pada nilai moral melalui mata pelajaran khusus. Evaluasi pendidikan di Indonesia masih menitikberatkan pada ujian nasional, sementara Malaysia menggunakan pendekatan holistik. Keduanya menghadapi tantangan serupa dalam integrasi teknologi dan kesenjangan infrastruktur pendidikan. Peran kepala sekolah di kedua negara juga menunjukkan perbedaan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil studi ini menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal serta perlunya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan sistem pendidikan dasar yang inklusif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan global.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hilyah Octavia Ramadhany

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: hilyahoctavia.hor@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikanlah sumber daya manusia yang berkualitas dapat terbentuk, nilai-nilai kemanusiaan ditanamkan, serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dikembangkan untuk menghadapi tantangan (Fitramadhana, 2023). Melalui Pendidikan, individu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghadapi tantangan kehidupan serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan dasar sebagai membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan dasar peserta didik. Dalam konteks ini, administrasi pendidikan memegang peranan krusial dalam mengelola dan mengarahkan sistem pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Indonesia dan Malaysia sebagai negara berkembang di kawasan Asia Tenggara memiliki sistem administrasi pendidikan dasar yang unik dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Perbandingan antara keduanya memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan dan praktik administrasi pendidikan dapat mempengaruhi kualitas dan pemerataan pendidikan dasar. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing, pendekatan yang digunakan dalam administrasi pendidikan dasar menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Setiap negara di dunia memiliki sistem pendidikan yang dirancang secara unik, menyesuaikan dengan karakteristik khas masing-masing negara, seperti kebutuhan masyarakat, latar belakang budaya, nilai-nilai sosial, serta kebijakan nasional yang berlaku. Perbedaan tersebut mencerminkan upaya tiap negara dalam membentuk generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan nasional mereka. Pendidikan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses yang disengaja dan terstruktur, di mana suatu lembaga atau institusi pendidikan secara sistematis memberikan pembelajaran, bimbingan, dan pengaruh positif kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar para peserta didik tidak hanya memperoleh kompetensi intelektual, keterampilan praktis, dan wawasan luas, tetapi juga memiliki kesadaran diri yang mendalam terhadap nilai-nilai sosial, tanggung jawab kolektif, dan keterikatannya dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan individu secara akademis, tetapi juga membentuk pribadi yang beretika, peduli, dan siap berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Pasien & Studi, 2024).

Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang dirancang secara khas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai budaya yang dianut, serta arah kebijakan nasional masing-masing. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dari lembaga pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang kompeten dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dalam konteks ini,



pendidikan berperan penting dalam membangun kepribadian dan karakter seseorang agar mampu memahami realitas sosial dan berperan aktif di dalamnya (Program et al., 2025). Salah satu aspek menarik dalam perbandingan ini adalah pendekatan terhadap pendidikan karakter. Indonesia mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran dan aktivitas sekolah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sedangkan Malaysia lebih menekankan pendidikan karakter melalui mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Kedua pendekatan ini mencerminkan filosofi pendidikan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kebijakan dan tantangan globalisasi. Menurut (Marmoah et al., 2023) kedua negara memiliki perbedaan mendasar dalam sistem administrasi pendidikan dasar yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Perbedaan struktur sistem pendidikan, tujuan pendidikan, kebijakan kurikulum, serta pendekatan evaluasi di Indonesia dan Malaysia mencerminkan strategi nasional masing-masing dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kebutuhan lokal. Studi mereka juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial-budaya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang efektif, di mana faktor seperti otonomi daerah, keberagaman budaya, dan latar belakang sejarah kolonial turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan dasar di kedua negara.

Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan pendidikan dasar, seperti desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peluncuran kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran fleksibel, integrasi teknologi digital, dan peningkatan kompetensi guru (Widiastuti, 2025). Namun, tantangan seperti disparitas sumber daya antarwilayah, kesenjangan kompetensi guru, dan integrasi teknologi yang belum merata masih menjadi hambatan. Widiastuti menyoroti pentingnya penguatan pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan pemerataan distribusi sumber daya pendidikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pendidikan juga menjadi perhatian utama. (Aprianto et al., 2023) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya pendidikan yang efisien melalui teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Teknologi memungkinkan pemerataan akses pembelajaran dan pengembangan profesional guru, meskipun tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan literasi teknologi masih perlu diatasi.

Program literasi digital pada tingkat pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian akademik, kesiapan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi mereka menyoroti pentingnya penerapan strategi yang adaptif dan kontekstual dalam pelaksanaan literasi digital guna menghadapi perbedaan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya di setiap negara. (Judijanto et al., 2024). Kepemimpinan kepala sekolah juga menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Menurut penelitian yang dipublikasikan di (Najibullah et al., 2022) kepala sekolah di Indonesia didorong untuk membentuk tim peningkatan mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sedangkan di Malaysia, kepala sekolah diharapkan mengoptimalkan peran guru dalam pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Perbedaan ini mencerminkan strategi nasional masing-masing dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan lokal.



Dengan demikian, perbandingan administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan kebijakan, kedua negara sama-sama berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran kepala sekolah serta guru. Studi-studi terbaru menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan lokal, penguatan kapasitas SDM pendidikan, dan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan sistem pendidikan dasar yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Perbandingan administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia juga mencerminkan adaptasi kedua negara terhadap perkembangan global dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam era digital, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Keduanya berupaya meningkatkan kemampuan literasi digital di kalangan siswa, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Di Indonesia, implementasi kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang bagi inovasi dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Sementara itu, Malaysia berfokus pada pengembangan pendidikan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan etika, yang diharapkan dapat membentuk karakter siswa secara lebih holistik (Judijanto et al., 2024). Kendati demikian, tantangan yang dihadapi kedua negara dalam administrasi pendidikan dasar tetap signifikan. Disparitas sumber daya, kualitas pengajaran, dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata menjadi isu utama yang harus ditangani (Aprianto et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk saling belajar dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan metode studi pustaka sebagai landasan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan kebijakan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang memengaruhi sistem administrasi pendidikan dasar di kedua negara tersebut.

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, perbedaan, dan persamaan dalam hal struktur sistem pendidikan, kebijakan yang diterapkan, serta praktik administrasi yang dijalankan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap dinamika administrasi pendidikan dasar berdasarkan literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan kebijakan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti untuk merangkum berbagai perspektif dan temuan dari studi-studi terdahulu, serta mengintegrasikannya ke dalam analisis yang sistematis dan kontekstual.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan administrasi pendidikan dasar antara Indonesia dan Malaysia, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 1. Perbandingan Struktur Sistem dan Kurikulum Pendidikan Dasar Indonesia-Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Struktur Pendidikan Dasar	6 tahun SD + 3 tahun SMP	6 tahun Primary School + 3 tahun Lower Secondary
Kebijakan Utama	Merdeka Belajar (desentralistik)	Kurikulum terpusat dengan integrasi nilai moral
Fleksibilitas Kurikulum	Tinggi - sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal	Rendah - kurikulum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
Pendidikan Karakter	Terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui PPK	Mata pelajaran khusus (Pendidikan Islam & Pendidikan Moral)
Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia	Bahasa Melayu
Fokus Pembelajaran	Inovasi dan kreativitas siswa	Integrasi nilai moral dan etika

Tabel 1 menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan administrasi pendidikan dasar antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan sistem desentralistik melalui kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, di mana siswa diharapkan menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses belajar. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem yang lebih terpusat dengan kurikulum yang ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, namun dengan penekanan khusus pada integrasi nilai-nilai moral dan etika melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Perbedaan filosofi ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara menginterpretasikan tujuan pendidikan dasar dalam konteks budaya dan sosial mereka, di mana



Indonesia lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovasi, sedangkan Malaysia fokus pada pembentukan karakter dan moral yang kuat.

1. Struktur Sistem dan Kurikulum

Sistem pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari enam tahun pendidikan di sekolah dasar, diikuti dengan tiga tahun pendidikan menengah pertama. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar, yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendekatan ini menciptakan ruang untuk inovasi dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem pendidikan yang serupa tetapi lebih terfokus pada kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan etika. Dalam hal ini, terdapat mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing negara menginterpretasikan tujuan pendidikan dasar dalam konteks budaya dan sosial mereka.

2. Implementasi Kurikulum dan Disparitas

Dalam aspek kebijakan kurikulum, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal implementasi yang konsisten di berbagai daerah. Meskipun kebijakan Merdeka Belajar memberikan kebebasan, terdapat disparitas dalam sumber daya yang menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian pendidikan. Malaysia, di sisi lain, memiliki kebijakan yang lebih terpusat, di mana kurikulum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendekatan ini memberikan konsistensi, tetapi mungkin membatasi inovasi yang bisa terjadi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, cara mereka melakukannya sangat dipengaruhi oleh struktur kebijakan yang ada.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Evaluasi Pendidikan Dasar Indonesia-Malaysia

Komponen Evaluasi	Indonesia	Malaysia
Jenis Evaluasi	Ujian Nasional (fokus hasil belajar)	Penilaian berkelanjutan (holistik)
Aspek Penilaian	Terutama akademik	Kognitif, afektif, dan psikomotor
Tekanan pada Siswa	Tinggi (penentu kelulusan)	Rendah (penilaian berkelanjutan)
Pengembangan Holistik	Terbatas	Komprehensif



Komponen Evaluasi	Indonesia	Malaysia
Sumber Daya Diperlukan	Sedang	Tinggi
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi

Tabel 2 mengungkap perbedaan fundamental dalam filosofi evaluasi pendidikan antara kedua negara. Sistem evaluasi Indonesia yang masih menitikberatkan pada ujian nasional mencerminkan pendekatan yang lebih berfokus pada hasil akademik, yang dapat menciptakan tekanan tinggi bagi siswa untuk mencapai nilai yang baik. Pendekatan ini, meskipun memberikan standar yang jelas untuk kelulusan, cenderung mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari perkembangan siswa seperti keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas. Sebaliknya, Malaysia dengan sistem penilaian berkelanjutan yang holistik memberikan ruang bagi pengembangan siswa secara menyeluruh, mencakup tidak hanya kemampuan kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Meskipun pendekatan Malaysia memerlukan sumber daya yang lebih besar dan waktu yang lebih intensif untuk implementasinya, sistem ini dinilai lebih efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa secara utuh, sejalan dengan tujuan pendidikan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga beretika dan berkarakter.

3. Sistem Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam membandingkan kedua sistem. Di Indonesia, evaluasi lebih berfokus pada hasil belajar siswa melalui ujian nasional, yang sering kali menjadi penentu kelulusan. Pendekatan ini dapat menciptakan tekanan bagi siswa untuk mencapai hasil yang baik, tetapi juga dapat mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari proses pembelajaran, seperti keterampilan sosial dan emosional. Di Malaysia, pendekatan evaluasi lebih holistik, dengan penilaian berkelanjutan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini memungkinkan siswa untuk berkembang secara lebih menyeluruh, tetapi juga memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk pelaksanaannya.

Gambar 2. Tantangan Bersama dalam Administrasi Pendidikan Dasar Indonesia-Malaysia





Gambar 2. Diagram alur menunjukkan tantangan utama yang dihadapi kedua negara dalam administrasi pendidikan dasar dan kebutuhan akan solusi kolaboratif untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik..

4. Pemanfaatan Teknologi dan Tantangannya

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh kedua negara. Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan siswa, infrastruktur yang tidak merata masih menjadi kendala. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Namun, penelitian oleh Aprianto et al. (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang efisien dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di Malaysia, meskipun teknologi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum, tantangan yang sama terkait dengan disparitas infrastruktur juga ada. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara perlu berfokus pada pemerataan akses teknologi untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat yang sama.

Tabel 3. Perbandingan Pemanfaatan Teknologi dan Tantangan Pendidikan Dasar Indonesia-Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia	Tantangan Bersama
Integrasi Teknologi	Literasi digital dalam kerangka Merdeka Belajar	Teknologi terintegrasi dalam kurikulum	Kesenjangan infrastruktur digital
Akses Teknologi	Tidak merata (disparitas wilayah)	Relatif lebih merata namun masih ada kesenjangan	Pemerataan akses di daerah terpencil
Infrastruktur	Masih terbatas di daerah pedesaan	Lebih baik namun belum optimal	Keterbatasan infrastruktur pendukung
Literasi Digital	Dalam tahap pengembangan	Terintegrasi dalam kurikulum	Perlu peningkatan kapasitas guru
Dampak Pandemi	Mempercepat digitalisasi pendidikan	Memperkuat sistem pembelajaran digital	Kesenjangan akses semakin terlihat

Tabel 3 menyoroti bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan dasar masih menjadi tantangan besar bagi kedua negara, meskipun dengan konteks yang berbeda. Indonesia dengan



kebijakan Merdeka Belajar berupaya mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran yang fleksibel dan inovatif, namun masih menghadapi kendala disparitas infrastruktur yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut penelitian Aprianto et al. (2023), pengelolaan sumber daya pendidikan yang efisien melalui teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, namun kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil masih menjadi hambatan utama. Malaysia, dengan sistem yang lebih terpusat, telah berhasil mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum nasional dengan relatif lebih konsisten, namun tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan akses. Kedua negara menyadari bahwa dampak pandemi COVID-19 telah mempercepat kebutuhan digitalisasi pendidikan, namun juga mengekspos kesenjangan digital yang lebih luas, sehingga diperlukan strategi yang lebih adaptif dan kontekstual untuk mengatasi perbedaan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam implementasi teknologi pendidikan.

5. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah juga berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Di Indonesia, kepala sekolah didorong untuk membentuk tim peningkatan mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung pengembangan profesional guru. Sementara itu, di Malaysia, kepala sekolah diharapkan untuk mengoptimalkan peran guru dalam pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Penelitian oleh (Najibullah et al., 2022) menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan dalam menciptakan budaya sekolah yang mendukung inovasi dan perbaikan. Perbedaan dalam harapan dan peran kepala sekolah di kedua negara mencerminkan strategi nasional masing-masing dalam menghadapi tantangan pendidikan.

Secara keseluruhan, perbandingan administrasi pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan kebijakan, kedua negara sama-sama berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Dengan saling belajar dari pengalaman satu sama lain dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, kedua negara dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Keduanya berupaya meningkatkan kemampuan literasi digital di kalangan siswa, namun dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, implementasi kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang bagi inovasi dalam pembelajaran, sedangkan Malaysia fokus pada pengembangan pendidikan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan etika.

Di tengah tantangan yang ada, penting bagi kedua negara untuk terus beradaptasi dan merespons kebutuhan lokal. Disparitas sumber daya, kualitas pengajaran, dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata menjadi isu utama yang harus ditangani. Oleh karena itu, kolaborasi lintas negara dan pertukaran pengalaman antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.



Tabel 4. Perbandingan Peran dan Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Indonesia-Malaysia

Aspek Kepemimpinan	Indonesia	Malaysia
Fokus Utama	Pembentukan tim peningkatan mutu	Optimalisasi peran guru dalam pengembangan karakter
Strategi Peningkatan Mutu	Perbaikan berkelanjutan internal sekolah	Pengembangan keterampilan dan karakter siswa
Pendekatan Manajemen	Kolaboratif dengan tim internal	Pemberdayaan guru sebagai agen perubahan
Pengembangan Profesional	Pelatihan berkelanjutan untuk guru	Mentoring dan coaching guru
Budaya Sekolah	Inovasi dan perbaikan berkelanjutan	Pembentukan karakter dan nilai moral
Tantangan Utama	Disparitas sumber daya antarwilayah	Konsistensi implementasi nilai moral

Tabel 4 mengungkap perbedaan strategis dalam peran kepemimpinan kepala sekolah yang mencerminkan prioritas kebijakan pendidikan masing-masing negara. Di Indonesia, kepala sekolah didorong untuk membentuk tim peningkatan mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan pada inovasi dan fleksibilitas. Pendekatan ini sejalan dengan sistem desentralistik yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut penelitian Najibullah et al (2022), kepemimpinan kepala sekolah di Indonesia lebih berfokus pada pengembangan internal sekolah melalui kolaborasi tim dan pelatihan berkelanjutan untuk guru. Sebaliknya, di Malaysia, kepala sekolah diharapkan untuk mengoptimalkan peran guru dalam pengembangan karakter dan keterampilan siswa, yang mencerminkan sistem terpusat dengan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan pendidikan disesuaikan dengan konteks kebijakan nasional, di mana Indonesia lebih menekankan pada inovasi dan perbaikan berkelanjutan, sedangkan Malaysia fokus pada pembentukan karakter dan konsistensi nilai-nilai moral dalam pendidikan.



Sistem Pendidikan Di Malaysia

Sistem pendidikan di Malaysia sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Inggris, yang meninggalkan jejak yang dalam pada struktur pendidikan negara tersebut, serupa dengan situasi di beberapa bekas koloni lainnya seperti India. Sebelum kolonialisme Inggris, pendidikan di Malaysia berfokus pada ajaran Islam dan diimplementasikan melalui pondok dan madrasah. Namun, dengan kedatangan Inggris, sekolah-sekolah berbasis bahasa Inggris diperkenalkan, memberikan akses pendidikan terbatas hanya kepada kelompok elit Melayu yang fasih berbahasa Inggris, sementara sebagian besar masyarakat Melayu kesulitan mengaksesnya karena kendala bahasa. Selain itu, Inggris juga memperkenalkan sistem pendidikannya yang tersegregasi secara etnis, dengan sekolah-sekolah yang dibedakan untuk etnis Melayu, Cina, dan India. Hal ini mengakibatkan pemisahan sosial yang berlangsung cukup lama (Putri & rahayu et al., 2022)

Pasca kemerdekaan, Malaysia mengambil langkah besar dalam merancang sistem pendidikan yang bertujuan mempromosikan integrasi nasional, memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, serta meningkatkan standar pendidikan berbasis sains dan teknologi. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan. Pada tahun 1983, Malaysia meluncurkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), diikuti oleh Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Kedua Kurikulum ini dirancang untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan mengarahkan pendidikan menuju tujuan nasional. Selain itu, beberapa kebijakan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Negara, dan Dasar Wawasan Negara diterapkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi global.

Sistem Pendidikan Di Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, sosial, dan kebijakan. Sistem ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tujuan utama dari sistem pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta dilengkapi dengan pendidikan non-formal dan informal yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan kemampuan berpikir kritis serta pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi di bidang sains dan teknologi, serta Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas lebih bagi sekolah dan siswa dalam menyusun metode pembelajaran. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru, serta keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. Di tengah tantangan ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan



akses pendidikan agar setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang (Sari, 2022).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata, keduanya menerapkan pendekatan administrasi pendidikan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah masing-masing. Indonesia mengedepankan desentralisasi melalui kebijakan Merdeka Belajar yang memberi fleksibilitas kurikulum, sementara Malaysia lebih terpusat dengan penekanan pada integrasi nilai moral dan etika melalui mata pelajaran khusus. Dari sisi evaluasi, Indonesia cenderung menggunakan ujian nasional sebagai tolok ukur, sedangkan Malaysia menggunakan sistem penilaian holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pemanfaatan teknologi, kedua negara menghadapi tantangan serupa seperti kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, meskipun sama-sama menyadari pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan.

Kepemimpinan kepala sekolah di kedua negara juga menunjukkan pendekatan berbeda: Indonesia lebih fokus pada peningkatan mutu internal sekolah, sementara Malaysia menekankan optimalisasi peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Perbandingan ini menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, pemerataan sumber daya, dan adaptasi kebijakan yang kontekstual. Dengan terus berinovasi dan saling belajar, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pendidikan dasar yang lebih inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berdaya saing di tingkat global.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprianto, I., Mahdayeni, M., Herliani, P., Iswanto, I., & Gelileo, M. A. (2023). Management of Education Utilizing Technology for Schools in Southeast Asia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 549–558. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.4037>
- Fitramadhana, R. (2023). Education in the Midst of Indonesia's Development Agenda. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p55-81>
- Judijanto, L., Heriyanto, T., Rozak, A., Fitriani, A., & Jasuli, D. (2024). a Cross-Cultural Analysis of the Socioeconomic Impacts of Digital Literacy Initiatives in Primary Education: a Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Singapore. *International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL)*, 2(1), 251–265.
- Marmoah, S., Poerwanti, J. I. S., Istiyati, S., Supianto, Sukarno, & Mahfud, H. (2023). Comparison of the Elementary School Educational Management in Malaysia and Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(8), 468–473. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i8.4679>
- Najibullah, N., Tuzzahra, M. F., & Muldani, V. (2022). Comparison Of Education Management In Indonesia And Malaysia In Efforts To Improve The Quality Of Education. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, x, 16168–16175.



Pasien, P., & Studi, H. (2024). 3 1,2,3. 4(September), 2020–2025.

Penelitian, A., Tenggara, A., Kunci, K., & Pendidikan, S. (2024). INDONESIA DAN MALAYSIA Program Studi Magister Teknologi Pendidikan , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Sriwijaya , Palembang , Indonesia. 5(2), 1360–1367.

Program, M., Manajemen, S., Islam, P., Islam, U., Mataram, N., Program, D., Manajemen, S., Islam, P., Islam, U., & Mataram, N. (2025). Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dan Pendidikan Malaysia.

Widiastuti, I. (2025). Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia : Challenges , Achievement , and Future Direction. 17, 1955–1964.
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6803>